LAPORAN PP 39
Tahun 2022

TRIWULAN IV

Inspektorat Jenderal

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Jenderal dapat menyelesaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Periode Triwulan IV Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dasar hukum penyusunan laporan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan ini dibuat dengan tujuan untuk melihat besaran sasaran keuangan yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV tahun 2022.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kegiatan di masa datang dan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Januari 2023

INSPEKTUR JENDERAL

MASROKHAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
I.1 Identifikasi Permasalahan 1
I.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal 1
I.1.2 Latar Belakang Kegiatan/Program 1
I.1.3 Struktur Organisasi 2
I.2 Rumusan Masalah 8
I.3 Sistematika Laporan 9
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN 10
A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 10
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022 14
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 18
III.1. Hasil Yang Telah Dicapai 18
III.2. Analisa Capaian Kinerja 38
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan 44
III.4. Langkah Tindak Lanjut 44
BAB IV. PENUTUP 45
LAMPIRAN 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal 12

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal 14

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022 15

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2022..... 19

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Desember 2022 20

Tabel 6 Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW III Tahun 2022…….39

Tabel 7 Monitoring Pagu dan Realisasi PDN Inspektorat Jenderal Tahun 2022..43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal 2

Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I 5

Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II 6

Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III 7

Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV 8

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Identifikasi Permasalahan

I.1.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sebagai unit kerja pengawas internal memiliki peran mendorong pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas organisasi serta mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, dan penyelewengan dari unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2022 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk

mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

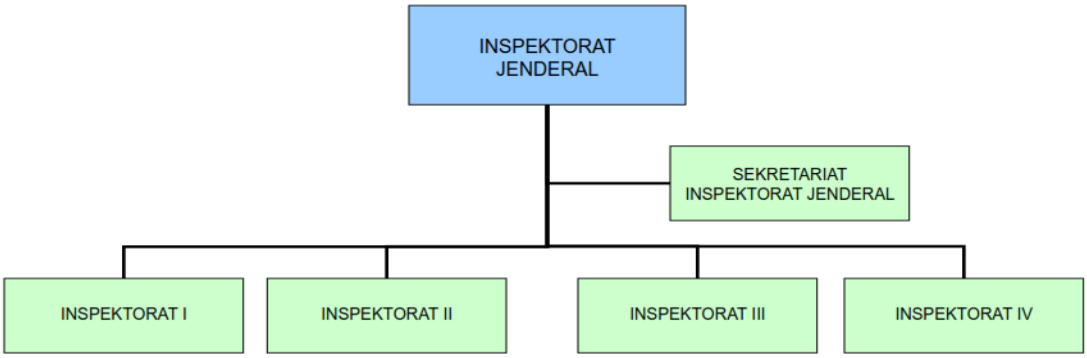

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Bagian umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha
   - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
   - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor

Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:

a) Auditor Utama: 1 orang;

b) Auditor Madya: 1 orang;

c) Auditor Muda: 6 orang;

d) Auditor Pratama: 7 orang.

- Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :

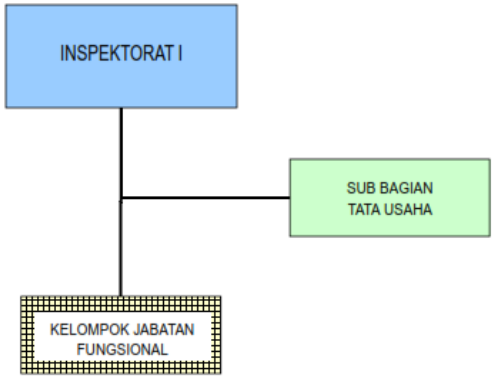

Gambar 2. Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
   - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

  Pada tahun 2022 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

  a) 1 (satu) orang Inspektur;
  b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
  c) Auditor: 14 orang;
  d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :

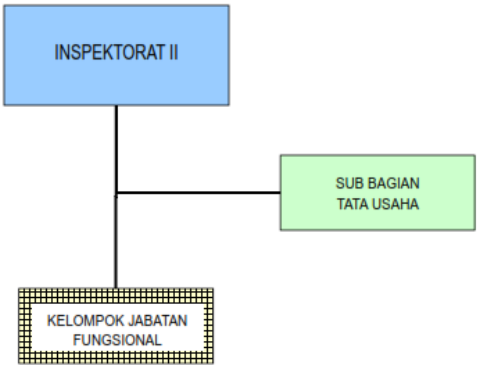

Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tuga s melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Indutri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :

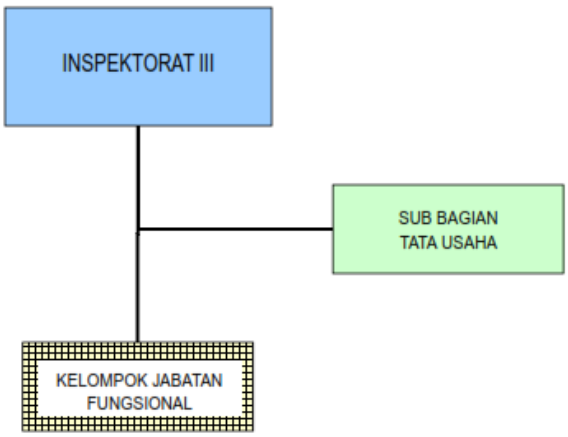

Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri

Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

   Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

   Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :

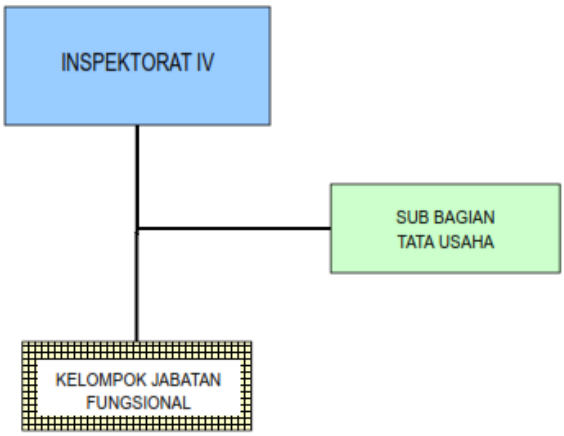

Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat IV

I.2. Rumusan Masalah

Evaluasi capaian kegiatan dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan Triwulan IV akan dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja Inspektorat Jenderal dan penetapan strategi yang diperlukan untuk mencapai target kinerja tahun 2022.

I.3. Sistematika Laporan

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2022 akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan

- A. Identifikasi Permasalahan
- B. Rumusan Masalah
- C. Sistematika Laporan

BAB II. Rencana Program/Kegiatan

- A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022
- B. SasaranProgram/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

BAB III. Pelaksanaan Program/Kegiatan

- a. Hasil yang telah dicapai
- b. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran
- c. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
- d. Langkah Tindak Lanjut

BAB IV. Penutup

LAMPIRAN

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan ”Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.*

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *"Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional"* yang bercirikan:

1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 155 Dokumen
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 23 Dokumen
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 114 Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV	- 1 Dokumen - 5 Dokumen - 31 Dokumen
5	Pengelolaan Manajemen Keseretariatan Bidang Pengawasan Internal	- Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal	- 2 Dokumen - 3 Laporan - 6 Dokumen -1 Laporan - 12 Bulan -1 Layanan -105 Pegawai - 1 Laporan -10 Dokumen - 12 Bulan - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2022 dianggarkan dengan pagu total setelah revisi ke-14 yaitu sebesar Rp 38.185.449.000,-.

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	72%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Level	3
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui *self assessment* atau penilaian dari BPKP	Level	3

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,3 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,3% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	90%	Jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan berkadar pengawasan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasI
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	Level 3	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan *Quality Assurance* BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.		3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner,Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Realisasi Capaian PenggunaanProduk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)= $\frac{RA_{P3DN}}{TotA_{P3DN}}$ Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus: Er = SRe Ts Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2022 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan IV dilakukan revisi ke-10 sampai dengan revisi ke-14, yang menghasilkan pagu penyesuaian menjadi Rp 38.185.449.000. Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan IV ini mayoritas merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah terlaksana dengan baik. Dengan adanya penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta hingga akhir September 2022 berada pada Level satu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 dan 43 Tahun 2022. Pelaksanaan WFO telah meningkat dengan komposisi pegawai diizinkan WFO 100%, namun tetap dengan protokol kesehatan yang baik. Efisiensi pelaksaan kegiatan perkantoran memang sebaiknya masih perlu dilakukan mengingat kasus Covid-19 di dunia belum berakhir serta pegawai telah terbiasa dengan situasi *new normal* ini yang dapat menghemat biaya transportasi dan waktu perjalanan ke kantor tanpa mengurangi produktivitas dan hasil pekerjaan yang ditargetkan.

Berdasarkan rekomendasi langkah tindak lanjut yang tertera pada laporan PP 39 Triwulan III, untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam memenuhi target capaian indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker, telah dilaksanakan temu teknis. Saat ini capaian kinerja tersebut memang mengalami peningkatan dari 73% menjadi 86,52% (target 92%). Terpantau unit kerja yang bersangkutan masih fokus pada penyelesaian rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada penyelenggaraan penilaian kinerja dimana salah satu unsur penilaiannya adalah penyelesaian tindak lanjut tahun berjalan. Selain itu, tidak adanya *punishsment* pada unit kerja yang tidak menyelesaikan rekomendasi hasil pengawasan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian hingga Triwulan IV Tahun 2022 (Januari-Desember) mencapai Rp 37.834.300.485,- atau 99,08 % dari total pagu anggaran efektif. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2022

Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			J u m l a h (Rp)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	1,983,753,000	1,983,519,970	99.99	0	0	233,030	0.01
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	1,925,000,000	1,898,541,285	98.63	0	0	26,458,715	1.37
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	1,925,000,000	1,912,292,419	99.34	0	0	12,707,581	0.66
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	1,925,000,000	1,924,683,149	99.98	0	0	316,851	0.02
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	30,426,696,000	30,115,263,662	98.98	0	0	311,432,338	1.02
T O T A L	**38,185,449,000**	**37,834,300,485**	**99.08**	**0**	**0**	**351,148,515**	**0.92**

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Desember 2022

No	Kode | Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 | Belanja Pegawai	16,853,574,000	16,627,577,680	98.66	0	0	225,996,320
2	52 | Belanja Barang	20,510,945,000	20,388,856,805	99.40	0	0	122,088,195
3	53 | Belanja Modal	820,930,000	817,866,000	99.63	0	0	3,064,000
Jumlah		**38,185,449,000**	**37,834,300,485**	**99.08**	**0**	**0**	**351,148,515**
		Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto					

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal periode Oktober hingga Desember 2022 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Pimpinan

a. Melakukan pengawalan Program dan Kegiatan berisiko tinggi pada BBSPJPPI;
b. Melakukan pengawalan Pembangunan Gedung Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu Tahun Anggaran 2023.
c. Kegiatan *Groundbreaking* Pembangunan Gedung Utama Indonesia Manufacturing Center (IMC) di Purwakarta yang akan dirancang menjadi pusat kolaborasi bagi perusahaan industri, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, masyarakat industri, dan pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan penguasaan teknologi industri;
d. Pengawalan Pencapaian Kinerja Atase Perindustrian KBRI di Tokyo. Pada kunjungan kerja tersebut, dibahas mengenai peluang peningkatan kerja sama dan investasi Indonesia-Jepang dengan fokus hilirisasi produk industri dan dukungan terhadap program substitusi impor Kemenperin.
e. FGD Penyusunan Laporan Pengawasan Penyediaan Minyak Goreng Curah di Ruang Rapat Nuri Lantai 2;
f. Mewakili Menteri Perindustrian menghadiri Undangan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2022 di Hotel Atria Serpong, Tangerang;
g. Partisipasi kegiatan *Capacity Building* Inspektorat Jenderal tahun 2022 dengan menghadirkan motivator Nanang Qosim Yusuf;
h. Pendampingan Revitalisasi Mesin dan Peralatan Serta Perolehan Predikat WBK pada BBSPJI Selulosa;
i. Acara FGD Penilaian Monev P3DN Semester II tahun 2022;
j. Menghadiri Rapat Pimpinan terbatas dengan Menteri Perindustrian dengan agenda antisipasi dampak stagflasi ekonomi global tahun 2022 terhadap tenaga kerja;
k. Menghadiri Undangan *Groundbreaking* Pembangunan Gedung SMK-SMAK Bogor di Bogor, Jawa Barat;

l. Menghadiri Seminar *Outlook* Industri dan *press conference* akhir tahun 2022 di Ruang Rapat Garuda Lt. 2.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- ✓ Uji Fisik Progres Termin I Pekerjaan Pematangan Lahan SMK SMAK Bogor;
- ✓ Reviu Perencanaan Kebutuhan BMN TA 2023 pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- ✓ Menghadiri Seminar Budaya Integritas dan Manajemen Resikio pada Politeknik IFPK Kendal;
- ✓ Pendampingan Tim Penilai Nasional untuk Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian Zona Integritas menuju WBBM di Politeknik ATI Padang;
- ✓ Verifikasi Pekerjaan Konstruksi yang Mendahului Kontrak pada Politeknik Industri Petrokimia Cilegon TA 2022;
- ✓ Reviu Revisi Anggaran pada BPSDMI;
- ✓ Melakukan Reviu Usulan Revisi Anggaran pada BPSDMI;
- ✓ Reviu RKA-KL pada BPSDMI dan Sekretariat Jenderal;
- ✓ Reviu RKBMN pada Sekretariat Jenderal
- ✓ Reviu Usulan Revisi DIPA Sekretariat Jenderal TA 2022;
- ✓ Reviu Revisi Anggaran pada APP Jakarta.
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Capaian P3DN Pasca Bimtek E-*Procurement* di Padang, Kendal, Solo, Surabaya, Makassar;
- ✓ Pendampingan Tim Penilai Nasional untuk Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian Zona Integritas menuju WBBM di Politeknik ATI Padang;
- ✓ Pendampingan Tim Penilai Nasional untuk Verifikasi Lapangan dalam rangka Penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja Wilayah Makassar;

- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- ✓ Koordinasi Hasil Reviu RKBMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I;
- ✓ Pembinaan Pengawasan pada BPSDMI;
- ✓ Uji Fisik Progres Termin II Pekerjaan Pematangan Lahan SMK SMAK Bogor.
- ✓ Audit Survey Pendahuluan Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada BPSDMI;
- ✓ Pembinaan Pengawasan pada BPSDMI;
- ✓ Koordinasi Hasil Perencanaan Kinerja dan Anggaran pada BPSDMI;
- ✓ Mendampingi Pimpinan Melakukan Uji Fisik Pekerjaan Pematangan Lahan pada SMK SMAK Bogor;
- ✓ Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
- ✓ Melakukan Uji Fisik Pekerjaan Pematangan Lahan pada SMK SMAK Bogor;
- ✓ Mendampingi Pimpinan Melakukan Uji Fisik Pekerjaan Pematangan Lahan pada SMK SMAK Bogor.

b. Inspektorat II

- ✓ Menghadiri Undangan Penelitian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2023;
- ✓ Menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Program/Kegiatan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2023 Pusat, Dekonsentrasi dan BPIPI;
- ✓ Sosialisasi Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Dana Alokasi Khusus Ditjen IKMA Tahun 2022;
- ✓ Koordinasi pengawasan pada BPKP Jakarta;

- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal IKMA TA 2022 di Kab. Lombok Barat;
- ✓ Pendampingan Tim Penilai Nasional untuk Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian Zona Integritas menuju WBBM di BBSPJI Kerajinan dan Batik.
- ✓ Koordinasi Nasional Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2022;
- ✓ Mengkoordinir Implementasi MTIDC pada Institut Teknologi Bandung;
- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal IKMA TA 2022 di Kab. Indramayu;
- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal IKMA TA 2022 di Kab. Sukoharjo, Kab. Lombok Barat, Kab. Lampung, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Magelang;
- ✓ Menghadiri Konsinyering Perumusan Penyusunan Neraca Komoditas Sektor Industri pada Direktorat Jenderal Sektor Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian;
- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Komputer Pondok Pesantren Nurul Burhany Futuhiyyah oleh Ditjen ILMATE di Kab. Demak;
- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal ILMATE TA 2022 di Kab. Toba;
- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal ILMATE TA 2022 di Kab. Bogor;
- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Mesin Peralatan IKM Pengolahan Kelapa dan Fasilitasi Mesin Peralatan IKM Pengolahan Jeruk oleh Ditjen IKMA di Kab. Sambas;
- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Mesin/Peralatan Pangan oleh Ditjen IKMA di Kab. Pasuruan;
- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal IKMA TA 2022 di Kab. Majalengka;

- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Mesin Peralatan IKM Kopi oleh Ditjen IKMA di Kab. Bima;
- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Komputer SMK Teknologi Plus Padang oleh Ditjen ILMATE di Kota Padang;
- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Komputer Yayasan AMIKOM Yogyakarta oleh Ditjen ILMATE di Yogyakarta;
- ✓ Pengawalan Kegiatan Fasilitasi Alshintan oleh Ditjen ILMATE di Kota Lampung;
- ✓ Menghadiri *Conference & Manufacturing Outlook* 2023;
- ✓ Menghadiri FGD Mengenai Kebutuhan dan Proyeksi Kedepan Komoditas Skrap Logam Dalam Negeri;
- ✓ Menghadiri Kegiatan Penganugerahan Penghargaan di Bidang IKM Tahun 2022;
- ✓ Pendampingan Kegiatan Bantuan Mesin dan Peralatan Pengolahan IKM Makanan Berbasis Susu di Kab. Bandung; - Koordinasi Program Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023;
- ✓ Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Pohon Industri di Sektor Industri Aneka dan Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Industri Mainan Anak;
- ✓ FGD Pemetaan Komoditas Skrap Logam dalam Rangka Kesiapan Penyusunan Neraca Komoditas Skrap Logam;
- ✓ Pemantauan Pelaksanaan Pengadaan PDN Direktorat Jenderal ILMATE TA 2022 di Kota Denpasar Provinsi Bali.

c. Inspektorat III

- ✓ Mengikuti National Conference IIA Indonesia;
- ✓ Melaksanakan Audit Program dan Kegiatan TA 2022 Pada Satker BSPJI Jakarta;
- ✓ Pengawalan Pekerjaan Konstruksi TA 2022 pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim Makassar;

- ✓ Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satker BBSPJIKFK Jakarta;
- ✓ Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat III;
- ✓ Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat III TA 2022 Pada Satker BBSPJIKFK Jakarta.
- ✓ Pengawalan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Fraksionasi Tandan Kosong Kelapa Sawit Pada Skala Pilot Pada BBSPJIA Bogor;
- ✓ Melaksanakan pengawalan pembangunan gedung Fitofarmaka dalam rangka pengawalan kegiatan risiko tinggi pada satker BBSPJIKFK;
- ✓ Melaksanakan Pengawalan Pekerjaan Konstruksi TA 2022 pada BBSPJPPI Semarang;
- ✓ Membantu pelaksanaan pengawalan pembangunan gedung Fitofarmaka dalam rangka pengawalan kegiatan risiko tinggi pada satker BBSPJIKFK Jakarta;
- ✓ Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satker BBSPJIKFK Jakarta, BBSPJIKMN Bandung, BSPJI Pekanbaru, BBSPJIHPMLM Makassar, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Surabaya, BSPJI Padang;
- ✓ Pendampingan Tim Penilai Nasional untuk Verifikasi Lapangan dalam rangka Penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja Wilayah Bandung;
- ✓ Melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan belanja paket meeting pada Pusdatin TA 2022 berdasarkan SPK No. 33/SJ-IND.7/PBJ/SPK-KONTRAK/X/2022 dan Surat Pesanan No. B-253/SJ-IND.7/PBJ/PPBJ/X/2022 (merujuk pada Surat Tugas No. 1556/IJ-IND/ST/X/2022);
- ✓ Rapat Pembahasan Laporan Pelaksanaan *Executive Partnership Program*;

- ✓ *Monitoring* dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satker BBSPJIKMN Bandung;
- ✓ *Monitoring* dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satker BBSPJIKKP Yogyakarta;
- ✓ *Monitoring* dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satker BSPJI Surabaya;
- ✓ *Monitoring* dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/Jasa pada Satker BSPJI Padang;
- ✓ *Monitoring* dan Evaluasi P3DN Pada Satker BBSPJIT Bandung.

d. Inspektorat IV

- ✓ Pelaksanaan Audit Kinerja Atase Perindustrian Tokyo;
- ✓ Menghadiri Undangan Sosialisasi Pelaksanaan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKAK/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2023;
- ✓ Menghadiri Undangan FGD Roadmap TKDN Sektor TPT dan Alas Kaki;
- ✓ Mengikuti National Conference IIA Indonesia;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Industri dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- ✓ Menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan P3DN Proyek GRR Tuban;
- ✓ Menghadiri Undangan FGD Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Silika;

- ✓ Pendampingan Tim Penilai Nasional untuk Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian Zona Integritas menuju WBBM di Politeknik ATI Padang;
- ✓ Reviu RKBMN Tahun Anggaran 2024 pada Ditjen IKFT, Ditjen Industri Agro, Ditjen KPAII, Pusat P3DN, dan PPIH;
- ✓ Penelitian dan Reviu Usulan Revisi DIPA dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Ditjen IKFT Tahun 2022;
- ✓ Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro TA 2022;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Teknis PPIH;
- ✓ Reviu Revisi DIPA P4DN TA 2022;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Neraca Kebutuhan Komoditas Perikanan untuk Industri dalam rangka Usulan Penetapan Neraca Komoditas Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada PDTT atas Belanja Modal Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dan 2015;
- ✓ Reviu Revisi Gaji Ditjen KPAII;
- ✓ Reviu RKA K/L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Unit Kerja Inspektorat IV pada Ditjen Industri Agro;
- ✓ Reviu RKA K/L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Unit Kerja Inspektorat IV pada Ditjen KPAII;
- ✓ Reviu RKA K/L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Unit Kerja Inspektorat IV pada PPIH;
- ✓ Reviu RKA K/L Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023 Unit Kerja Inspektorat IV pada Pusat P3DN;
- ✓ Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 pada PPIH;
- ✓ Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 pada Pusat P3DN;
- ✓ Reviu Revisi Dipa ke-7 Ditjen KPAII untuk Keperluan Atase Perindustrian di Brussels;

- ✓ Reviu Revisi DIPA pada Pusat P3DN TA 2022
- ✓ Reviu Revisi DIPA dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai Ditjen IKFT dan Optimalisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2022;
- ✓ Reviu Revisi DIPA pada IA.
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Kegiatan "*Executive Class: Halal Awareness*";
- ✓ Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja TA 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) di Bandung;
- ✓ Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja TA 2021 Pusat Pemberdayaan Industri Halal (PPIH) di Bogor dan Depok;
- ✓ Pengawalan Strategic Business Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki;
- ✓ Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja TA 2021 pada Pusat P3DN di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah;
- ✓ Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan Pelanggan Kegiatan Pengujian Lapangan Audit P3DN di Jawa Barat;
- ✓ Survey Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN pada Wilayah D.I. Yogyakarta;
- ✓ Survey Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN di Jawa Barat;
- ✓ Survey Pendahuluan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Administrator KEK Palu;
- ✓ Pengawalan Strategic Business Matching (SBM) Rencana Aksi Kebijakan Substitusi Impor Sektor Industri Kimia Hulu;
- ✓ Menghadiri Undangan FGD Penyusunan Panduan Penilaian P3DN di lingkungan Pemerintah Pusat;
- ✓ Pengawalan atas Penyusunan Rancangan Kebijakan Industri Halal dan Indeks Industri Halal serta Verifikasi Kemampuan Industri dalam Penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan Dalam Negeri Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu;

- ✓ Pengawalan atas Penyusunan Rancangan Kebijakan Industri Halal dan Indeks Industri Halal;
- ✓ Pengawalan terkait Verifikasi Kemampuan Industri dalam Penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan Dalam Negeri Komoditas Sektor Industri Kimia Hulu;
- ✓ Verifikasi Kemampuan Industri (VKI) Aspal Buton;
- ✓ Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
- ✓ Menghadiri Undangan Rapat Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- ✓ Survey Lapangan dalam rangka Audit Kinerja TA 2021 pada Pusat P3DN di Wilayah Jawa Tengah;
- ✓ Survey Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN di Jawa Timur;
- ✓ Pendampingan Verifikasi Lapangan pada Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Kayu Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan TA 2022;
- ✓ Pengawalan Tim Teknis Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Pengolahan Kayu;
- ✓ Kunjungan Industri Penanganan Permasalahan pada Industri TPT dan Alas Kaki di Wilayah Jawa Barat;
- ✓ Pengawalan Penyusunan Panduan Penilaian P3DN di lingkungan BUMN dan BUMD;
- ✓ Survey Lapangan terkait Monitoring dan Evaluasi P3DN pada PT. Panca Karya Unggul Abadi, PT. Dwida Jaya Tama, PT. Indovickers Furnitama, PT. Sinar Mandiri Perdana, PT. Gistex Garmen Indonesia, PT. Cahaya Kilau Maxxindo, PT. Indovickers Furnitama;
- ✓ Pemantauan P3DN Proyek GRR Tuban;

- ✓ Pengawalan Penyusunan Panduan Penilaian P3DN di lingkungan BUMN dan BUMD;
- ✓ Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022 pada PPIH dan Pusat P3DN;
- ✓ Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh;
- ✓ Pendampingan Verifikasi Lapangan pada Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Kayu Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan TA 2022.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

a. Program dan Anggaran, antara lain telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1) Trilateral Meeting Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Peridustrian Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 Desember 2022 dimana Inspektorat Jenderal mengajukan perubahan informasi kinerja terkait Indikator Unit Eselon I yang muncul di Inspektorat Jenderal namun sebenarnya milik unit eselon I lainnya;

2) Bilateral Meeting Persiapan Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024 bersama dengan Bappenas untuk membahas rancangan awal kegiatan Kementerian Perindustrian/ Inspekorat Jenderal Tahun 2024;

3) Sosialisasi pembahasan teknis Aplikasi KRISNA dalam rangka penyusunan program dan anggaran Kementerian/Lembaga pada Aplikasi KRISNA secara *online*;

4) Penyusunan Konsep Revisi *Automatic Adjustment* Inspektorat Jenderal sesuai Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 257/SJ-IND/PR/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 terkait *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian Perindustrian Tahun 2023 dimana Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi blokir sebesar Rp 4.408.001.000,-;

5) Sosialisasi Modul Sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) RKAKL pada Aplikasi SAKTI yang membahas teknis penggunaan Aplikasi KRISNA SAKTI.

6) Penyusunan DIPA revisi 10 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 195/SJ-IND/PR/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal revisi DIPA dalam rangka pemenuhan kebutuhan Belanja pegawai dan penghematan blokir AA Belanja pegawai Kementerian Perindustrian TA 2022 dimana Inspektorat Jenderal mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 1.379.803.000,- yang bersumber dari blokir AA belanja pegawai tunjangan kinerja sehingga anggaran Inspektorat Jenderal menjadi Rp 40.521.427.000,-. Revisi ini juga memuat realokasi anggaran Inspektorat Jenderal untuk kegiatan rapat koordinasi pengawasan Kementerian Perindustrian sebesar Rp 872.136.000,-.

7) Penelitian RKA-K/L Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal sesuai surat undangan Kepala Biro Perencanaan Nomor B/1628/SJ-IND/1/PR/IX/2022 tanggal 30 September 2022 Hal Undangan Penelitian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2023 bersama Biro Perencanaan;

8) Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal pada tanggal 18-21 Oktober 2022 dengan APIP Inspektorat III;

9) Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal tanggal 10-27 Oktober 2022 bersama dengan DJA secara online via Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sesuai surat Undangan Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman nomor UND-162/AG.3/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Hal Undangan Penelaahan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2023;

10) Revisi Anggaran Pagu Alokasi Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sesuai dengan Rekomendasi Biro Perencanaan, APIP, dan Mitra DJA serta finalisasi RKA-K/L Pagu Alokasi 2023 tanggal 31 Oktober 2022;

11) Pengajuan Revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-11 dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2022;

12) Pemutakhiran data pada Aplikasi KRISNA dalam rangka penyesuaian Informasi Kinerja dan Anggaran agar menyesuaikan dengan Aplikasi SAKTI;

13) Pemaparan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan Oktober 2022, dan melakukan identifikasi terkait anggaran-anggaran yang tidak dapat diselesaikan dan direalokasi untuk kegiatan lainnya;

14) Menyusun konsep narasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2023;

15) Revisi DIPA dalam rangka pemutakhiran POK ke Kanwil DJPB perbendaharaan yang diresmikan oleh DIPA revisi ke-12 tanggal 24 November 2022;

16) Revisi DIPA sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 239/SJ-IND/XI/2022 tanggal 22 November 2022. Hal Realokasi Anggaran Blokir *Automatic Adjustment* ke Bagian Anggaran Bendahara Umum negara TA 2022, dimana Inspektorat Jenderal mengalami penurunan anggaran sebesar Rp 2.335.978.000. Adapun dalam revisi ini tidak mengalami penurunan keluaran (*output*).

b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) pada tanggal 10 November 2022 dengan peserta seluruh Dirjen/Kepala Badan dan kepala UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian. Agenda dari Rakorwas 2022 sebagai berikut:

1) Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengawasan Bersama antara Inspektur Jenderal & Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

2) Pemberian penghargaan APIP Awards 2022 bagi unit kerja yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ✓ Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I terbaik
- ✓ Penghargaan PMPRB terbaik
- ✓ Penyelesaian terbaik tindaklanjut hasil pengawasan
- ✓ Unit kerja berpredikat WBK/WBBM Tahun 2021
- ✓ Capaian terbaik belanja produk dalam negeri (PDN)
- ✓ Capaian terbaik pelaksanaan Stranas-PK melalui realisasi belanja bela pengadaan.

3) Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Tahun 2023;

4) *Leaders Insight* Para Eselon I Kementerian Perindustrian & Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;

5) Pengawasan P3DN;

6) Evaluasi Pengawasan 2022 dan Rencana Pengawasan 2023

c. Untuk pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal, telah dilaksanakan:

1) Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Reviu Rencana Kebutuhan BMN TA 2024;
2) Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat penyusunan Laporan Kinerja di BPKP;
3) Persiapan pemetaan/penilaian kompetensi PNS (Talent Pool) dalam rangka penguatan dan peningkatan implementasi Manajemen Talenta dan Sistem Merit pada Instansi Pusat dan Daerah.

d.Pendampingan Penilaian mandiri Zona Integritas Tahun 2022 pada satker di Bandung;

e. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan; g. Penyelesaian laporan perbendaharaan rutin tiap bulan.

f. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan eksternal:

a) Verifikasi awal data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal (rutin), verifikasi awal dilakukan oleh Tim Penyelesaian

Tindak Lanjut sebelum disampaikan kepada ketua tim auditor untuk di validasi;

b) Koordinasi dengan Auditor pemeriksa untuk verifikasi kesesuaian dokumen tindak lanjut dalam rangka Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) MRI Kementerian Perindustrian tahun 2022;

c) Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (rutin), telah dilaksanakan koordinasi dan telah diverifikasi auditor dokumen dengan auditor pemeriksa;

g. Koordinasi dengan satuan kerja Kementerian Perindustrian untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan menyampaikannya kepada Inspektorat Jenderal (rutin). Dilaksanakan melalui rapat maupun koordinasi melalui media elektronik dengan PIC Auditi;

h. Menyiapkan Bahan dan Mengikuti Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Saldo Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada PDTT atas Belanja Modal;

a. Berkoordinasi dengan Pusat P3DN untuk menyiapkan data Survei Penilaian Integritas dari Sisi Pelayanan Pemberian Sertifikat TKDN;

b. Koordinasi pelaksanaan penggunaan Aplikasi Stranas PK;

c. Verifikasi awal data dan dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal (rutin). Verifikasi awal dilakukan oleh Tim PTL sebelum disampaikan kepada Ketua Tim Auditor untuk di validasi;

d. Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (rutin), telah dilaksanakan koordinasi dan telah diverifikasi auditor dokumen dengan auditor pemeriksa;

e. Koordinasi dengan satuan kerja Kementerian Perindustrian untuk Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan menyampaikannya kepada Inspektorat Jenderal (rutin).

Dilaksanakan melalui rapat maupun koordinasi melalui media elektronik dengan PIC Auditi;

f. Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2021 yang bersifat administratif;

g. Penyelenggaraan Rapat Pra Temu Teknis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal;

h. Penyelenggaraan Rapat Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemantauan atas Pelaksanaan Proyek Surat Berharga Syariah Nasional Triwulan III Tahun 2022 pada Kementerian Perindustrian. Untuk pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal, telah dilaksanakan;

i. Menyelenggarakan *Entry Meeting* Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan IV Tahun 2022 oleh BPKP;

j. Menyelenggarakan Temu Teknis Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Pada Ditjen KPAII, BSKJI, Ditjen ILMATE, Pusat P3DN, Ditjen IKFT, BPSDMI, Ditjen IKMA, Inspektorat Jenderal

k. Berkoordinasi Dengan Biro Umum dan Tim Stranas PK terkait Wawancara/Diskusi dan Cek Fisik Dalam Rangka Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola, Penetapan Aksi, dan Monitoring Evaluasi Stranas PK Tahun 2019 s.d. Tahun 2022 pada Kementerian Perindustrian;

l. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, BSKJI, dan BPSDMI terkait Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Sistem Pengendalian Intern serta *Management Letter* Tahun Anggaran 2021;

m. Berkoordinasi dengan BPSDMI terkait Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia

Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun 2021 pada Kementerian Perindustrian;

n. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Pusat P3DN terkait Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK pada Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2021;

o. Rapat dalam rangka pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Tata Kelola, Penetapan Aksi, dan Monitoring Stranas PK Tahun 2019-2022 pada Timnas PK, Setnas PK, dan KLPD oleh BPK;

p. Rapat Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester II Tahun 2022 dengan TIM PTLRHP dan Tim Keruneg BPK;

q. Menyusun dan Mengumpulkan Data Penyelesaian Kerugian Negara Semester II Tahun 2022.

i. Pengembangan dan pengelolaan SDM Inspektorat Jenderal yang dilakukan selama Triwulan IV (Oktober-Desember 2022) adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Reviu Rencana Kebutuhan BMN TA 2024;
2) Mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat penyusunan Laporan Kinerja di BPKP;
3) Persiapan pemetaan/penilaian kompetensi PNS (*Talent Pool*) dalam rangka penguatan dan peningkatan implementasi Manajemen Talenta dan Sistem Merit pada Instansi Pusat dan Daerah.

j. Penyelesaian Evaluasi dan Pelaporan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV 2022, yaitu:

1) Capaian Kinerja dan progressnya telah selesai di input pada Smart DJA dan E-Monev BAPPENAS hingga Bulan September 2022.
2) Penyusunan laporan yang diselesaikan di Semester II tahun 2022 adalah laporan temuan hasil pengawasan eksternal (hasil pengawasan

eksternal oleh BPK) Semester I dan laporan pemutakhiran data penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker Triwulan IV Tahun 2021, serta Laporan Klinik Konsultasi Semester I;

3) Laporan APIP Semester I tahun 2022 telah selesai.

k. Pendampingan Zona Integritas di Satker Makassar;

l. *Entry Meeting* Reviu P3DN Semester II 2022;

m. Penyusunan Panduan Penilaian P3DN;

n. Koordinasi kelengkapan dokumen reviu P3DN Semester II 2022;

o. Pelantikan Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional Arsiparis;

p. Pemetaan/Penilaian Potensi dan Kompetensi PNS (*Talent Pool*) dalam rangka penguatan dan peningkatan implementasi Manajemen Talenta dan Sistem Merit pada Instansi Pusat dan Daerah di Kantor badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta;

q. Rapat Pleno Penilaian Angka Kredit Auditor Semester I Tahun 2022 ke Narasumber di BPKP;

r. Partisipasi dalam Pembahasan Laporan Pelaksanaan *Executive Partnership Program* (EPP);

s. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan;

t. Penyelesaian laporan perbendaharaan rutin tiap bulan.

III.2 Analisa Capaian Kinerja

Capaian realisasi dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 6. Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW IV 2022

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW IV	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1.3%	Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2021, yaitu temuan BPK LK TA 2021 sebesar Rp911.451.935,12 dibagi realisasi belanja Kemenperin 2021 Rp22.754.170.682.332,00 adalah **0,033%**	Data masih menggunakan Tahun 2021 karena BPK belum me*released* hasil tahun 2022
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	90%	Hasil aduan pada TW IV berdasarkan pada Laporan Kegiatan Pengaduan Masyarakat periode 1 September s.d. 31 Desember 2022, terdapat 52 aduan online yang tidak berkadar pengawasan. Jadi total aduan selama tahun 2022 yaitu hanya 2 aduan yang berkadar pengawasan dan telah ditindaklanjuti, **100%**	
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	92%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh satker sebesar **86,52%** dengan total rekomendasi 890. Tindak Lanjut yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 702, belum sesuai rekomendasi sebanyak 68 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 120.	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Nilai RB area penguatan pengawasan	72%	Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenperin Tahun 2022 dengan nota dinas nomor 152/IJ-IND/PW/VI/2022Telah tercapai sebesar **89.92%**	
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3	Hasil penjaminan kualitas dapat disimpulkan bahwa nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3.063. Sedangkan nilai MRI sebesar **2.85**	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW IV	Keterangan
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Berdasarkan hasil Survey TW IV, dengan rincian: -Inspektorat I: 93.25% -Inspektorat II: 91.85% -Inspektorat III: 83.25% -Inspektorat IV: 87.75%	
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	- Telah dilakukan pemenuhan dokumen dan penilaian IACM; - Hasil penilaian IACM di tahun 2022 mencapai **nilai 3 (*delivered*)** berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Kapabilitas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor: PE.09.03/S-1054/D1/04/2022	
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	78%	Pada triwulan IV hasil yang diperoleh Inspektorat Jenderal yaitu: **97.77%** dengan rincian: -Ir I: 100% -Ir II: 94.44% -Ir III:100% -Ir IV: 96.67%	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	80%	Pada Triwulan IV, capaian Itjen mencapai 39,03%. Hingga Triwulan IV, Realisasi Belanja produk dalam negeri Inspektorat Jenderal yaitu **93%** dengan rincian: -Ir I: 99.99% -Ir II: 96.38% -Ir III: 99.82% -Ir IV: 99.98% -SetItjen: 92.15%	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	76%	Telah dilaksanakan survey Efektivitas regulasi yang diterapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal, maka realisasi efektivitas regulasi sebesar **100%.** (data terlampir)	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78.4	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) nomor 118/IJ-IND/LHE/V/2022 Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal yaitu **77.80 dengan predikat BB**	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW IV	Keterangan
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahunan dengan PKPT	90%	Berdasarkan Laporan -Ir I: 96%, -Ir II: 95.24% -Ir III: 100% -Ir IV: 100%	
		Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Berdasarkan laporan : a. Inspektorat I: - b. Inspektorat II: 100% c. Inspektorat III: 100% d. Inspektorat IV: 100%	
		Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	72%	PadaTriwulan IV, telah dilaksanakan survey indeks kepuasan layanan dukungan manajemen Inspektorat Jenderal. Rata-rata nilai yang diperoleh adalah **91,4% (Sangat Puas).**	
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	92%	Telah selesai dilaksanakan penilaian pada tanggal 15 Mei 2022, dan Berdasarkan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kemenperin Tahun 2022 dengan nota dinas nomor 152/IJ-IND/PW/VI/2022 dengan hasil nilai **91.52%**	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	75	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga Desember tahun 2022 mencapai **87,12**	
8	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	73	Perhitungan indeks profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal satu tahun pada 2022 yaitu **80,28%**	
		Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	65%	*Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 yaitu **78,95%**	
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	76%	Realisasi hingga TW IV yaitu **97,2%**	

Keterangan :

🟢 : Telah tercapai

🟡 : Dalam proses pelaksanaan

🔴 : Tidak tercapai

Berdasarkan tabel 6 tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 ini terdapat empat indikator kinerja yang belum dapat tercapai dan dua diantaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1) Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU tidak dapat mencapai target 92%, karena terdapat unit kerja terkait belum menindaklanjuti rekomendasi internal yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
2) Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU belum mencapai level 3 karena Perban BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang metode penilaiannya semakin rigid dan kondisi Kementerian Perindustrian masih kurang memenuhi ekspektasi dari kriteria penilaian.
3) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal belum sesuai target karena tidak terpenuhinya beberapa hal kriteria penilaian SAKIP sebagaimana tertera pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
4) Nilai Komponen Pengungkit Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Jenderal belum sesuai dengan target 92% karena masih terdapat proses bisnis pada Inspektorat Jenderal yang belum memenuhi kriteria penilaian RB.

Oleh karena itu, tindaklanjut yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yaitu:

1) Mengadakan temu teknis penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan secara rutin.
2) Merevisi target capaian Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) sesuai dengan Perban BPKP Nomor 5 Tahun 2021

3) Memperbaiki kualitas laporan sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan pada LHE SAKIP Inspektorat Jenderal Tahun 2021.

4) Memperbaiki Proses Bisnis Inspektorat Jenderal sesuai dengan *Area of Improvement.*

Dapat disimpulkan juga bahwa 15 indikator kinerja yang telah berhasil dicapai Inspektorat Jenderal. Indikator Kinerja Utama yang telah berhasil mencapai targetnya antara lain:

1. Batas Toleransi Temuan Material pengawasan eksternal berhasil mencapai target realisasi dibawah 1.3%. Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal tahun 2021, yaitu temuan BPK LK TA 2021 sebesar Rp 911.451.935,12 dibagi realisasi belanja Kemenperin 2021 Rp 22.754.170.682.332,00 adalah 0,033%. Angka yang dipergunakan merupakan data 2021 karena pada tahun 2022 BPK belum mereleased hasil penilaiannya.
2. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal menggunakan akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Monitoring Pagu dan Realisasi PDN Inspektorat Jenderal Tahun 2022

Unit Kerja	Pagu P3DN	Realisasi PDN	Realisasi Impor	Persentase Realisasi PDN (%)
Set Itjen	7.203.646.000	6.638.104.248	7.589.973	92,15
Inspektorat I	199.055.000	199.042.090	-	99,99
Inspektorat II	159.712.000	153.935.608	2.397.000	96,38
Inspektorat III	166.848.000	166.555.213	-	99,82
Inspektorat IV	551.343.000	551.219.386	-	99,98
TOTAL	8.280.604.000	7.708.856.545	9.986.973	93,10

Berdasarkan tabel 7 ini, rata-rata perolehan persentase realisasi PDN pada tahun 2022 yaitu 93,10% angka tersebut tidak termasuk realisasi TKDN.

III.3 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan IV Tahun 2022, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal terdapat hambatan dan kendala, antara lain:

1) Tidak semua kegiatan pada Inspektorat dapat terlaksana dikarenakan adanya pemotongan anggaran;
2) Realisasi capaian fisik pada aplikasi PP39 masih terdapat kendala pada aplikasi tersebut yang saat ini masih dalam perbaikan;
3) Penginputan realisasi keuangan pada Aplikasi SAKTI mengharuskan sampai dengan detail akun sehingga revisi POK sering dilakukan untuk menghindari pagu minus.
4) Masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai.

III.4 Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan IV, Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan;
2. Membudayakan pengendalian risiko ke seluruh satuan kerja sehingga mempermudah pelaksanaan pengawasan dan menerapkan prosedur pengawasan yang berbasis sistem informasi di Inspektorat Jenderal;
3. Melaksanakan akselerasi program/kegiatan dan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal serta melakukan penyesuaian target pada perjanjian kerja tahun 2023 berdasarkan prosedur dan peraturan baru.
4. Berkoordinasi dengan Pusdatin agar kendala pada aplikasi PP39 segera teratasi;
5. Melakukan kontrol pagu sampai dengan detail akun dan melakukan perencanaan realisasi anggaran setiap bulannya.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan IV Tahun 2022 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 (Januari-Desember) mencapai Rp37.834.300.485,00 atau 99.08 % dari total pagu anggaran sebesar Rp38.185.449.000,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran terdapat empat indikator kinerja yang belum dapat tercapai dan dua diantaranya merupakan indikator kinerja utama, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan IV dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN